

Membuka Ruang Cela Khilafah HTI

written by Harakatuna

Sungguh melewati masa yang tak sebentar, sekurang-kurangnya enam puluh lima tahun yang silam Hizb al-Tahrir berdiri tegak di Pelestina lewat ijihad politik mantan Mahkamah Syariah di Pelestina, Syekh Taqi al-Din al-Nabhani, pada tanggal 1953 M. Perjalanan dari rentang waktu yang sangat panjang dalam sejarahnya, sebagaimana dikutip dari Dale F. Eickelman, Hizbu al-Tahrir merangkak ke berbagai negara, mulai dari negara Arab di Timur Tengah, Afrika, Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair, dan juga menjajah ke berbagai negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Austria, sampai ke Amerika hingga Malaysia dan Indonesia.

Sebenarnya, tidak terlalu penting membicarakan sejarah Hizb al-Tahrir (HT) secara umum, atau Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) secara khusus. Namun, sebagian masyarakat dibuat risih dengan gelombang gerakan politik HTI yang berada di Indonesia, dengan tidak mengakuinya sebagai negara yang berideologi Pancasila sekaligus menjadi klaim bahwa HTI menolak sistem pemerintahan Indonesia. Tentu alasan inilah yang sangat penting untuk membaca buku [Khilafah HTI dalam Timbangan](#). Kenapa HTI memiliki keinginan kuat untuk merekonstruksi negara Islam menjadi sistem pemerintah yang angkuh dan absolut? Tidak lain karena ideologisasi, dan merasa dengan *khilafah*-lah [HTI](#) paling benar, yang dianulir oleh Ainur Rofiq al-Amin sebagai ruang hegemoni kapitalisasi ideologi.

Sebelum memasuki labirin landasan ideologisasi politik *Khilafah*, Dr. Ainur Rofiq al-Amin, memaparkan rekonstruksi *khilafah* itu sendiri meski tidak terlalu banyak. Menurut, kitab yang diterbitkan oleh Hizb al-Tahrir, *Afkar Siyasiyah*, salah satu kewajiban partai politik-nya adalah mengembalikan denyut kehidupan Islam melalui terwujudnya [khilafah](#), yang diyakini sebagai satu-satunya perintah *aqidah Islamiyyah* (hlm. 63). Dalam Islam manusia memiliki kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan, berlandaskan al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, menjadi pijakan kuat bagi Hizb al-Tahrir untuk membentuk kelompok atau jamaah yang bersifat politik (*Ahdzabu al-Siyasiyah*) dengan visi-misi kembali kepada syariah Islam. Pembentukan politik di atas dapat menjadi salah satu mediasi yang dapat

mengontrol, sekaligus mengkritik pemerintah untuk menegakkan *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Padahal untuk menegakkan *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*, tak harus mewujudkan dengan partai politi berlabel *khilafah*, dengan mengembalikan semua kontruksi urusan politik dan negara pada hukum syariah agama Islam zaman dulu. Kenyataannya, nabi tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk membentuk negara model *khilafah* yang diusung oleh HTI. Namun, lagi-lagi [HTI](#) membantah jika kemudian Islam diinternalisasikan secara sepotong-sepotong, secara terpisah, secara terpenggal, dan tak utuh sehingga mengakibatkan keberislaman masyarakat tidak kaffah. Itulah menjadi awal kewajiban untuk mendirikan partai politik tadi sebagai gerakan yang menyeru kepada negara Islam *khilafah Islamiyah*. HTI dimana-mana menyatakan bahwa isu penting dunia adalah mengembalikan teggaknya hukum Allah melalui *khilafah*; *the vital issue for muslim in the whole world is the re-establishment of the rule of Allah through establishing the khilafah*.

Beberapa argumentasi yang argumentatif tentang ideologisasi politik *khilafah* di paparkan dalam buku HTI yang berjudul *al-Fikr al-Islam*, salah satunya mendirikan *khilafah* merupakan *fardu kifayah*. Prinsip ini mengemukakan bahwa, selama *khilafah* belum berdiri tegak maka pada saat itulah setiap individu muslim yang *mukallaf* berkewajiban menegakkannya tanpa pandang bulu hatta *khilafah* benar-benar berdiri (hlm. 156). Paling ekstrim Hizb al-Tahrir dalam kitabnya *al-Shakhsiyayah al-Islamiyyah*, mengklaim bahwa umat muslim sedunia jika tak berusaha menegakkan *khilafah* adalah berdosa, bahkan berdosa besar jika diwaktu lain meremehkan. Jika anggapan HTI meremehkan tegaknya *khilafah* adalah dosa besar, maka Indonesialah yang paling berdosa menurut HTI. Meski bukan hanya Indonesia yang menolak Hizb al-Tahrir, sekurang-kurangnya ada 20 negara.

Di mata HTI semua partai di Indonesia, baik yang komunis, kapitalis, nasionalisme dilarang berdiri, begitupun partai Islam. Meski HTI sendiri mengakui adanya partai Islam di Indonesia, akan tetapi menurutnya tidak absah dan tidak memenuhi syarat, karena banyak partai Islam menyeru kepada demokrasi dan nasionalisme yang kafir atau *thaghut*.

Sikap ekstrim HTI telah mengantarkan gerbang organisasi ini menjadi gerakan yang tak memberikan kontribusi apa-apa terhadap negara bahkan lebih tragis;

menjadi organisasi yang dilarang pemerintah pasca dicabutnya status badan hukum ormas oleh Kementerian Hukum dan HAM (19/08/17). Dilarangnya HTI menurut Dr. Ainur Rofiq akan lebih baik sekaligus menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, karena pelan tapi pasti HTI akan semakin tak leluasa untuk bergerak dan beraktifitas, lambat laun gaung HTI akan semakin berkurang dan akhirnya runtuh kemudian menghilang seiring berjalannya waktu (hlm. 91).

Dalam buku yang ditulis Dr. Ainur Rofiq al-Amin, selain hasil dari disertasi selama kurun waktu yang begitu lama, lima tahun sebagai anggota HTI, sekaligus menyentuh langsung akan aktivitas-aktivitas yang dilakukan HTI, tidak diragukan buku [Khilafah HTI dalam Timbangan](#) secara objektive diteropong secara internal oleh seorang mantan aktivis HTI ini mampu untuk memberikan pemahaman yang kompleks tentang Hizb al-Tahrir, sekaligus buku ini merupakan cambuk kritik atas berbagai kesalahan yang terdapat di dalam ideologisasi kerangka visi-misi Hizb al-Tahrir yang perlu diperhatikan oleh berbagai kalangan masyarakat umum ataupun mahasiswa.

Judul Buku : ***Khilafah HTI dalam Timbangan***

Penulis : Ainur Rofiq al-Amin

Tahun Terbit : Juli 2017

Penerbit : Pustaka Harakatuna

Halaman : 319

ISBN : 978-602-61885-1-9

***Jamalul Muttaqin**, penulis essai, sekarang tinggal di PP. Ali Maksum, Krapyak Yogyakarta.